

Jawa Timur.

Pertama sejumlah pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024 terlebih dahulu menandatangani deklarasi yang telah disiapkan.

Sebanyak 18 perwakilan partai politik kemudian membubuhkan tanda tangan.

Setelah itu disusul para ketua penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim A Warits.

Prosesi tandatangan selanjutnya dilakukan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, perwakilan dari Kajati Jatim, Ketua DPRD Jatim Kusnadi serta Ketua Pengadilan Tinggi Jatim.

Terdapat enam poin isi deklarasi Pemilu damai 2024 yang ditandatangani, sebagai berikut:

1. Siap mengikuti Pemilu tahun 2024 secara jujur, adil, santun dan bermartabat.
2. Siap bekerjasama dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu tahun 2024, untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau sara, berita hoaks dan provokasi.
3. Siap bekerja sama dengan aparat Polri dan TNI, untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Jawa Timur, serta dapat mengendalikan massa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Siap menerima hasil penghitungan suara Pemilu tahun 2024 berdasar keputusan KPU Provinsi Jawa Timur.
5. Siap mewujudkan Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur berjalan secara aman, damai, dan sukses serta turut memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif.
6. Siap menolak politik identitas yang mengarah kepada ujaran kebencian.

Sementara itu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr Toni Harmanto, M.H mengatakan bahwa dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 pihak Polda Jatim telah menyiapkan lebih kurang 23.593 personel gabungan jajaran Polda dengan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024.

“Semua personel yang terlibat Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 kita pastikan benar – benar siap mengamankan Pemilu 2024 khususnya di wilayah Jawa Timur,” ujar Irjen Toni usai menyaksikan Sispamkota, Selasa (17/10).

Selain itu Irje Toni Harmanto juga mengatakan bahwa Polda Jatim terus memaksimalkan fungsi inteljen yang terus bergerak untuk memetakan, mencari isu, yang disinyalir dapat mengganggu kondusifitas Pemilu.

Begitu pula dari pihak TNI dan pemerintah daerah Jawa Timur, tentu juga melakukan pemetaan dan juga mendeteksi adanya isu – isu yang berpotensi

mengganggu jalannya Pemilu kelak.

“Jadi dengan sinergitas kami, kolaborasi yang kami lakukan maka kita bisa tahu isu – isu yang harus dihadapi dan wilayah – wilayah mana saja yang perlu penebalan pengamanan,” jelas Irjen Toni.

Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh Masyarakat khususnya warga Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas Jawa Timur terutama pada tahapan – tahapan Pemilu 2024.

“Beda pilihan boleh, namun persatuan dan kesatuan harus tetap kita kedepankan,” pungkas Irjen Toni Harmanto. (*)